

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERANGKA KERJA SENDAI (SFDRR) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SITUBONDO

Dwi Bayu Taufiqur Rahman
NPP. 29.0925

*Asdaf Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: dbayu591@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The awareness of the people of Sentani District about The Sendai Framework is expected to be a guidelines for natural disaster management at national and regional levels according Master Plan for Disaster Management (RIPB) 2020-2044. However, its implementation in the regions is still hampered and has not been achieved so that the community still has not received the benefits. **Purpose:** This research to obtain a description of the implementation of the Sendai Framework Policy in flood disaster, the supporting and obstacles factors, and the efforts made to improve the implementation of the Sendai Framework policy. **Method:** This research using a descriptive design with an inductive approach where the research informants consist of elements of the government and elements of society. Collecting data using observation, interview, and documentation techniques. Obtained data analysed and presented with the stages of data reduction, data display, and drawing conclusions. The data analysis used the theory of policy implementation from Van Metter and Van Horn (1975) in (Anggara (2018: 242) and the priorities for action of the Sendai Framework. **Result:** The results obtained from the research shows the implementation of the Sendai Framework (SFDRR) policy in flood disaster management is still not good because knowledge of the Sendai Framework is still low, disaster risk reduction is incidental, apparatus and community resources are still inadequate, and limited facilities and infrastructure disaster however, the priority action values of the Sendai Framework are already present in flood disaster management in Situbondo. **Conclusion:** he implementation of the Sendai Framework policy has not yet been implemented in flood disaster management in Situbondo Regency even though in flood disaster management there is already a priority action value of the Sendai Framework in it.

Keywords: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, management disaster, Flood disaster Management

ABSTRAK

Problem Statement/Background (GAP): Kerangka Kerja Sendai diharapkan menjadi pedoman dalam penanggulangan bencana secara nasional dan daerah sesuai dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044. Namun implementasinya di daerah masih terhambat dan belum tercapai sehingga masyarakat masih belum menerima manfaatnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang Implementasi Kebijakan Kerangka Kerja Sendai dalam penanggulangan banjir, faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan Kerangka Kerja Sendai. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan induktif dimana informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dengan tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Anggara (2018: 242) dan langkah prioritas Kerangka Kerja Sendai. **Hasil/Temuan:** Hasil yang didapatkan dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kerangka Kerja Sendai (SFDRR) dalam penanggulangan bencana banjir masih kurang baik disebabkan pengetahuan Kerangka Kerja Sendai masih rendah, pengurangan risiko bencana masih bersifat insidental, sumber daya aparatur dan masyarakat masih kurang memadai, serta sarana dan prasarana kebencanaan yang terbatas namun nilai-nilai tindakan prioritas Kerangka Kerja Sendai sudah terdapat dalam penanggulangan bencana banjir yang ada di Kabupaten Situbondo. **Kesimpulan:** implementasi kebijakan Kerangka Kerja Sendai masih belum dilaksanakan dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Situbondo walaupun dalam penanggulangan bencana banjir sudah terdapat nilai tindakan prioritas Kerangka Kerja Sendai di dalamnya.

Kata kunci: Kerangka Kerja Sendai, Pengurangan Risiko Bencana, Bencana Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan potensi bencana yang tinggi. Menurut Maplecroft (2010) Indonesia merupakan negara yang berisiko paling ekstrim nomor dua di dunia. Dengan demikian, masyarakat yang selalu berada dalam ancaman bahaya bencana harus menyadari wilayahnya memiliki risiko bencana yang tinggi (Karina dan Stefani:2020). Tingginya potensi bencana di Indonesia ternyata tidak diiringi dengan kemampuan Indonesia untuk menghadapi bencana. Menurut data dari BNPB bahwa total bencana pada tahun 2020 sebanyak 4.650. Dikutip dari CNBC <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210303142043-4-227555/kacau-indonesia-rugi-rp-228-triliun-pertahun-akibat-bencana> Indonesia mengalami kerugian sebesar 22,8 triliun dalam 10 tahun terakhir yang tercatat oleh Kementerian Keuangan. Menurut UNISDR, masyarakat yang berpotensi terkena dampak bencana sebanyak 5.404.239 orang penduduk berada di daerah berpotensi kehilangan nyawa karena bencana dan berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Bencana tidak hanya menjadi permasalahan Indonesia saja. Bencana sudah menjadi isu krusial bagi masyarakat dunia. kejadian bencana dan kerugian yang diakibatkan membuat masyarakat internasional sadar akan pentingnya memiliki semangat bersama untuk melakukan penanggulangan bencana. Semangat bersama internasional itu diwujudkan dalam berbagai perjanjian, deklarasi, *Memorandum of Understanding (MOU)*, dan regulasi yang berdasarkan pada pengalaman dan isu-isu berbagai negara dalam penanggulangan bencana. Pedoman yang diakui di dunia dalam penanggulangan bencana secara umum yakni *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* (SFDRR) atau Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2015-2030 yang diresmikan PBB dalam Konferensi Dunia Ketiga pada 18 Maret 2015 di Sendai Miyagi, Jepang untuk menjadi pedoman dalam membangun ketangguhan dalam penanggulangan bencana Internasional. SFDRR merupakan instrumen terusan dari *Hyogo Framework for Action (HFA)* pada tahun 2005-2015. Prioritas aksi SFDRR yaitu Memahami risiko bencana, Memperkuat Tata kelola risiko, Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana, dan Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana untuk respon yang efektif serta membangun kembali lebih baik.

Indonesia adalah termasuk dari 187 negara di dunia yang ikut meratifikasi hasil dari Konferensi PBB tentang pengurangan bencana dari *Hyogo Framework for Action (HFA)* 2005-2015 kemudian digantikan oleh *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) 2015-2030. HFA dan SFDRR dijadikan sebagai suatu pedoman dalam pembuatan peraturan serta pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia yang dibuktikan dengan mengadopsikannya ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dijabarkan dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 dan rangkaian peraturan lain. Kemudian juga menjadi landasan pada ketetapan kewajiban tentang penanggulangan bencana pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kewajiban masyarakat, penganggaran, peran suatu lembaga, dan tahapan penanggulangan bencana. Kerangka Kerja diatas juga menjadi landasan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama internasional.

SFDRR memiliki tujuan untuk membangun ketangguhan dan mengurangi kerusakan akibat bencana serta pengurangan risiko bencana di seluruh dunia. Dalam harapan mencapai tujuan tersebut diperlukan ketekunan dan dukungan untuk mencapai tujuh target yang harus dicapai sebagai indikator keberhasilannya. Kemudian untuk mencapai target tersebut terdapat kebutuhan untuk tindakan prioritas dalam penanggulangan bencana oleh negara di tataran global, nasional, regional, dan lokal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan Kerangka Kerja Sendai dalam Penanggulangan Bencana. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana periode 2015-2019 Willem Rampangilei implementasi SFDRR di Indonesia pada dasarnya sebagian besar dimuat dalam kebijakan pengurangan risiko bencana Indonesia yang diselaraskan dengan

SFDRR dikutip dari <https://bnpb.go.id/berita/forum-prb-media-koordinasi-dan-penguatan-kapasitas-penanggulangan-bencana>. Dalam RENAS PB 2020-2024 (2020:31) program dan kegiatan dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia diatur dalam RPJMN tahun 2015-2019 dan tahun 2020-2024 dan kebijakan serta strategi Nasional dalam Penanggulangan Bencana 2015-2019 dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 mengacu kepada pengurangan risiko bencana berdasarkan kerangka SFDRR. Berkaitan dengan hal tersebut Implementasi SFDRR diharapkan menjadi pedoman dalam penanggulangan bencana di tataran nasional maupun daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi SFDRR adalah permasalahan dalam pengintegrasian pengurangan risiko bencana yang ada di daerah. Hal itu disampaikan oleh Sekertaris Utama BNPB Dodi Ruswandi saat Working Session “SFDRR dan Pengarustamaan Risiko Bencana” di Surakarta tahun 2015 (<https://bnpb.go.id/berita/tantangan-sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030-bagi-indonesia>) SFDRR masih belum bisa masuk kedalam tataran implementatif di daerah. Sehingga tidak dapat berdampak pada masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Implementasi nilai-nilai SFDRR di daerah masih sangat kurang dan hal itu dibuktikan dengan kurangnya pengetahuan akan Kerangka Kerja Sendai.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, perlu juga merujuk pada Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR). Implementasi kerangka kerja tersebut dapat dilakukan secara tepat di Kabupaten Situbondo. Bencana banjir di Situbondo memiliki risiko paling tinggi diantara bencana yang lain. Bencana ini sudah menjadi bencana tahunan yang terjadi di kabupaten Situbondo. Di provinsi Jawa Timur, daerah sepanjang pantai utara dan pantai selatan pulau Jawa merupakan daerah yang rawan banjir salah satunya adalah kabupaten Situbondo. Banjir di Situbondo biasanya disebabkan oleh meluapnya air sungai Sampean dan Deluwang. Daerah aliran sungai (DAS) sungai Sampean yang memiliki luas 1.347 kilometer yang bermuara di Situbondo. Kawasan yang rawan bencana banjir ialah Kecamatan Situbondo, Besuki, Panarukan Kendit, Panji, dan Bungatan (RPI2-JM Situbondo 2016-2019).

Berdasarkan tujuan dan sasaran rencana induk penanggulangan bencana tahun 2020 sampai 2044 yaitu meningkatkan ketangguhan serta pengurangan risiko bencana dalam jangka panjang harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, Oleh karena itu dalam penanggulangan bencana banjir di Situbondo perlu melakukan implementasi ketetapan dan pelaksanaan SFDRR sebagai instrumen untuk pengurangan risiko bencana. Implementasi SFDRR dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat, capaian, pemetaan isu, dan tantangan dalam penanggulangan bencana banjir di Situbondo.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Kerangka Kerja Sendai maupun penanggulangan bencana banjir. Penelitian Karina Stefanie dan Natalia Yeti berjudul Uji Reabilitas Sendai Framework for Disaster Risk Reduction Dalam Rehabilitasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Karina & Natalia, 2020) menemukan upaya rehabilitasi *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* telah dilakukan dalam rehabilitasi kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung namun belum adanya koordinasi dan komunikasi yang terarah. Penelitian Dewald Niekerk, Christo Coetzee, dan Livhuwani Nemaconde berjudul *Implementing the Sendai Framework in Africa: Progress Against the Target (2015-2018)* menemukan bahwa Negara Afrika

telah membuat kemajuan dalam penerapan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*, namun masih memerlukan tindakan tegas untuk mencapai target (Niekerl, Goetzee, Nemaconde, 2020). Penelitian Guys Jackson, Karen McNamara, dan Bradd Witt yang berjudul *A Framework for Disaster Vulnerability in a Small Island in The Southwest Pacific: A Case Study of Emae Island, Vanuatu* menemukan terdapat keterbatasan ketahanan mata pencaharian di Pulau Emae, terutama kurangnya pemberdayaan perempuan dan masih banyak kerentanan bencana yang belum ditangani secara memadai (Jackson, McNamara, & Witt, 2017). Penelitian selanjutnya Anis Listarini yang berjudul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo dalam Penanganan Pascabencana Banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo* menemukan bahwa peran BPBD pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi kurang berjalan dengan baik yaitu pada tidak dapatnya mengalokasikan dana hibah dari APBD dalam pasca bencana (Listarini, 2017).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Kebijakan Kerangka Kerja Sendai dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Situbondo dengan pembahasan SFDRR empat prioritas yang dibahas secara deduktif pada semua indikator dalam penanggulangan bencana yang dilakukan di Situbondo, metodenya yang digunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian Karina, Natalia, Niekerk, Coetzee, Nemaconde, Jackson, Witt, dan Listarinni. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Anggara (2018: 242) yang digunakan untuk implementasi kebijakan dengan enam indikator. yakni (1) Standard dan Tujuan Kebijakan; (2) Sumber Daya Kebijakan ; dan (3) Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Kegiatan; (4) Karakteristik Lembaga Pelaksana; (5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan (6) Disposisi Pelaksana.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh deskripsikan implementasi kebijakan Kerangka Kerja Sendai (SFDRR), faktor penghambat dan pendukung, dan upaya untuk meningkatkan implementasi kebijakan Kerangka Kerja Sendai dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Situbondo.

II. METODE

Penelitian ini metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui reduksi data, data display/ penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing* atau *Verification*). Data diperoleh dengan teknik Triangulasi data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan teknik *purposive sampling* terhadap 15 informan. Adapun analisis menggunakan teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Anggara (2018: 242) yang digunakan untuk implementasi kebijakan dengan enam indikator. yakni (1) Standard dan Tujuan Kebijakan; (2) Sumber Daya Kebijakan ; dan (3) Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Kegiatan; (4) Karakteristik Lembaga Pelaksana; (5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan (6) Disposisi Pelaksana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan Kerangka Kerja Sendai dalam penanggulangan bencana banjir di kabupaten Situbondo, maka digunakan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Anggara (2018: 242) dengan enam indikator. yakni (1) Standard dan Tujuan Kebijakan; (2) Sumber Daya Kebijakan ; dan (3) Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Kegiatan; (4) Karakteristik Lembaga Pelaksana; (5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan (6) Disposisi Pelaksana. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Standard dan Tujuan Kebijakan

Penulis melakukan pengukuran terhadap Standard dan Tujuan Kebijakan Kerangka Kerja Sendai. Penulis mencoba menganalisis kebijakan penanggulangan bencana banjir di Situbondo berdasarkan langkah prioritas dalam Kerangka Kerja Sendai. Standard dan tujuan kebijakan Kerangka Kerja Sendai masih belum baik. Hal itu dibuktikan dengan dimensi berikut;

1. Realita di lapangan bahwa Kerangka Kerja Sendai masih belum diketahui oleh para pejabat dan aparatur dari BPBD Kabupaten Situbondo. Dari seluruh pegawai BPBD yang hanya mengetahui Kerangka Kerja Sendai adalah Kepala Seksi Pencegahan dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kedaruratan
2. Penjabaran Kerangka Kerja Sendai dalam penanggulangan bencana banjir dalam kebijakan daerah juga dapat dilihat pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2021- 2026. Muatan dalam RESTRA BPBD ini memperhatikan arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Situbondo. Rencana strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara pencapaian yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.
3. Nilai-nilai Kerangka Kerja Sendai juga terdapat dalam produk hukum penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo tersebut. Nilai-nilai Kerangka Kerja Sendai terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 6 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan bencana.

3.2 Sumber Daya Kebijakan

Penulis melakukan pengukuran terhadap sumber daya kebijakan. Kebutuhan sumber daya dalam mendukung terlaksananya suatu kebijakan adalah suatu keharusan. Dengan adanya sumber daya dapat memberikan perubahan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan suatu kebijakan nantinya akan membutuhkan berbagai sumber daya yang digunakan untuk menjalankan berbagai tujuan yang direncanakan oleh kebijakan. Sumber daya kebijakan masih belum baik dalam implementasi kebijakan Kerangka Kerja Sendai. Hal itu dibuktikan dengan dimensi berikut;

1. Dukungan Sumber daya manusia di BPBD kurang memadai. Hal itu disebabkan aparatur di BPBD tidak memiliki ilmu ahli atau bukan disiplin ilmunya. Peran serta swasta dalam pengurangan risiko bencana khususnya banjir masih sangat rendah. Pihak swasta masih belum memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas menghadapi bencana diperlukan

peran dari pihak swasta. Masyarakat dapat memberikan dukungan dari kearifan lokal yang ada di Situbondo. Kearifan lokal tersebut berupa pengajian yang dilakukan masyarakat, pengajian tersebut kemudian dimanfaatkan oleh BPBD melalui agennya untuk memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat.

2. Dukungan Anggaran Pengalokasian anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Situbondo tidak mencukupi. Secara keseluruhan dukungan anggaran untuk penanggulangan bencana dan khususnya banjir masih kurang karena anggaran yang dimiliki Situbondo masih tergolong kecil dan ditambah penanggulangan bencana masih bukan prioritas utama dalam pembangunan daerah serta anggaran sebagian besar digunakan untuk penanganan Covid-19.
3. Dukungan Sarana dan prasarana kebencanaan yang dimiliki BPBD Kabupaten Situbondo belum mencukupi. Terdapat banyak peralatan kebencanaan yang tidak dalam kondisi yang baik karena tidak terawat serta belum adanya gudang penyimpanan yang cukup membuat tidak semuanya disimpan di tempat yang baik.

3.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Kegiatan

Dalam melaksanakan kebijakan agar berjalan efektif dan efisien diperlukan komunikasi antar organisasi sebab dalam Kerangka Kerja Sendai dalam penanggulandangdibutuhkan berbagai unsur pendukung. Penulis melakukan pengukuran terhadap komunikasi antar organisasi dan penguatan kegiatan sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan dimensi Koordinasi BPBD Kabupaten Situbondo terhadap BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten lain terjalin sangat baik dan intens. Hubungan antar lembaga tersebut sangat intens sampai BPBD terasa instansi pusat yang berada di daerah. Koordinasi diantara instansi yang di daerah Situbondo juga terjalin sangat baik terutama mengenai koordinasi tentang bencana.

3.4 Karakteristik Lembaga Pelaksana

Dalam sebuah implementasi kebijakan, karakteristik dari badan pelaksana mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan. Karakteristik lembaga pelaksana tersebut termasuk Standar Operasional yang ada dalam lembaga tersebut. Standar operasional termasuk kompetensi dan tata kelola yang ada dalam lembaga. Pelaksanaan kebijakan dalam suatu lembaga menuntut adanya hubungan kerjasama antar lini di dalam pemerintahan termasuk juga dalam pembagian tugas dan wewenang yang jelas agar tidak terjadinya tumpah tindih dalam pelaksanaan tugas serta terjalinnya kerja efektif dan efisien. Penulis melakukan pengukuran terhadap Karakteristik lembaga pelaksana masih belum baik. Hal itu dibuktikan dengan dimensi Standar Operasional Prosedur yang dijalankan aparatur BPBD masih belum cukup baik karena terkendala kurangnya tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya. Namun meski demikian, para pegawai BPBD sudah dapat menjalankan penanggulangan bencana sudah cukup baik berdasarkan SOP yang ada dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

3.5 Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menyebabkan terhambatnya implementasi kebijakan sebaliknya jika kondisinya mendukung akan memperlancar jalannya implementasi dari sebuah kebijakan. Penulis mencoba melakukan analisis studi dokumentasi dan wawancara untuk mencari tahu kondisi ekonomi, sosial dan politik di Kabupaten Situbondo. Analisis penulis mendapatkan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik masih belum baik. Hal itu dibuktikan dengan dimensi berikut;

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik Kabupaten Situbondo kurang mendukung untuk mengimplementasikan Kerangka Kerja Sendai. Angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo berdasarkan data dari BPS pada tahun 2020 terdapat sebanyak 83.740 penduduk miskin atau persentase penduduk miskin sebesar 12,22% total jumlah penduduk. Angka tersebut masih tergolong cukup tinggi. IPM Situbondo sudah menunjukkan kemajuan yang besar namun masih dalam status “sedang”, karena capaian IPM Situbondo masih mencapai 67,38 persen dibawah IPM nasional yaitu 71,94 persen. Masyarakat Situbondo memiliki karakter watak yang cukup keras. Dua wilayah Situbondo antara wilayah timur dan wilayah barat memiliki perbedaan watak masyarakat seperti yang disampaikan dalam wawancara bahwa wilayah barat memiliki kecondongan tidak patuh kepada petugas sedangkan wilayah timur memiliki kecondongan untuk bekerjasama dengan baik.

3.6 Disposisi Pelaksana

Keberhasilan pelaksanaan implementasi bergantung pada sikap dari pelaksana kebijakan dalam memahami permasalahan dengan menggunakan sikap menerima atau menolak dari sebuah kebijakan. Pelaksana disini adalah seseorang yang memiliki peran untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. Penulis melakukan analisis terhadap disposisi pelaksana menemukan bahwa disposisi pelaksana masih belum baik. Hal itu dibuktikan dengan dimensi berikut;

1. Aparatur BPBD sebagai pengambil keputusan dalam penanggulangan bencana menerima Kerangka Kerja Sendai. Mereka menerima nilai-nilai yang ada dalam Kerangka Kerja Sendai dengan cacatan menyesuaikan dengan kearifan lokal serta kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Situbondo sehingga mereka memfokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Partisipasi Masyarakat masih belum merata. Masyarakat yang pernah menjadi korban dari bencana banjir dan yang berada di daerah alisan sungai memiliki kesadaran dan partisipasi yang baik dalam pengurangan risiko banjir, namun sebagian besar masyarakat yang masih belum pernah menjadi korban banjir tidak memiliki kesadaran dan partisipasi

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Kebijakan Kerangka Kerja Sendai belum memberikan banyak dampak positif untuk penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Situbondo. Penulis menemukan temuan penting yakni pengurangan risiko bencana belum menjadi prioritas dan hanya bersifat insidental saja di Kabupaten Situbondo ketika bencana yang terjadi menimbulkan dampak yang besar baru menjadi prioritas. Pengetahuan tentang Kerangka Kerja Sendai juga sangat rendah bahkan dalam aparatur BPBD hanya terdapat satu orang saja yang mengetahuinya yakni kepala seksi pencegahan. Penulis juga

menemukan bahwa sumber daya apatur yang dimiliki BPBD juga masih rendah, para aparatur bukan berasal dari disiplin ilmu kebencanaan. Kesadaran pengurangan risiko masyarakat Situbondo secara keseluruhan masih rendah dan hanya masyarakat yang tinggal daerah potensi banjir ataupun masyarakat yang pernah menjadi korban bencana yang memiliki kesadaran yang baik. Peran pihak swasta untuk mendukung pengurangan risiko bencana juga rendah. Sarana dan prasarana kebencanaan yang dimiliki BPBD juga masih sangat terbatas bahkan untuk EWS masih belum terpasang. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh alokasi anggaran yang sangat kecil untuk BPBD Kabupaten Situbondo. Permasalahan anggaran juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Listarini; 2017). Hambatan yang dialami selanjutnya dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo terdapat pada kondisi geografis yang memanjang serta karakter banjir yang disebabkan oleh air kiriman dari Kabupaten Bondowoso sehingga menyulitkan untuk melakukan pencegahan banjir. Hal ini sama halnya yang terjadi di Pulau Emae, Vanuatu bahwa kerentanan bencana masih belum ditangani secara memadai (Jackson, McNamara, & Witt, 2017).

Faktor yang dapat menjadi pendukung implementasi kebijakan Kerangka Kerja Sendai dalam penanggulangan bencana banjir ini terdapat pada solidaritas dan koordinasi BPBD dengan instansi yang ada di Kabupaten Situbondo, BPBD Kabupaten lain, BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB berjalan sangat baik. Keterbatasan anggaran ataupun peralatan pada BPBD Kabupaten Situbondo cukup terbantu oleh bantuan BPBD Kabupaten lain, BPBD Provinsi, dan BNPB. Intansi kebencanaan ini memiliki solidaritas yang solid. Berbeda dengan yang terjadi pada koordinasi dan komunikasi rehabilitasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung pasca bencana Tsunami pada penelitian (Karina & Natalia, 2020). Penanggulangan bencana di Kabupaten sudah ada yang mengandung nilai nilai yang terkandung dalam tindakan prioritas Kerangka Kerja Sendai. Sama halnya yang dilakukan di negara Africa yang telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam penerapan Kerangka Kerja Sendai walaupun masih memerlukan tindakan lanjut untuk mencapai target (Niekerl, Goetze, Nemaconde, 2020). Dalam upaya meningkatkan pengurangan risiko bencana, Kabupaten Situbondo melakukan pelatihan dan sosialisasi pencegahan dan mitigasi bencana, membentuk desa tangguh bencana, melakukan pengadaan peralatan kebencanaan.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis juga membahas Empat Tindakan Prioritas Kerangka Kerja Sendai mengalir secara deduktif dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Situbondo

- a. Memahami Risiko Bencana masih sudah baik dibuktikan walaupun pengetahuan SFDRR masih rendah, perumusan kebijakan dalam RPJMD 2016-2021 dan misi pembangunan telah mengandung nilai pengurangan risiko bencana.
- b. Penguataan Tata Kelola Risiko Bencana Untuk Mengelola Risiko Bencana masih rendah dibuktikan walaupun tata kelola risiko sudah ditingkatkan, namun pengarustamaan risiko belum menjadi prioritas dan masih insidental serta belum terjalin kerjasama kemitraan dalam penanggulangan bencana.
- c. Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan masih sangat minim hal itu dibuktikan pengalokasian sumber daya dan pembangunan hanya untuk memperbaiki kerusakan serta belumnya mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam instrumen fiskal dan pembangunan infrastruktur kritis

- d. Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana untuk Respon yang Efektif sudah cukup baik hal itu dibuktikan telah melakukan upaya meningkatkan ketahanan masyarakat dan telah dibuat papan informasi kebencanaan dan tanda evakuasi bencana namun untuk EWS dicabut kembali. Namun untuk “Membangun Kembali Lebih Baik” dalam pasca bencana masih rendah hal itu dibuktikan pasca bencana masih belum mencapai tahapan “membangun kembali lebih baik” belum menjadi prioritas utama serta masih insidental saja.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kerangka Kerja Sendai dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Situbondo belum berjalan dengan baik dikarenakan Standar dan tujuan kebijakan Kerangka Kerja Sendai belum ada penjabaran, produk hukum, dan pemahaman yang masih rendah, Sumber daya kebijakan yang masih belum mendukung pelaksanaan kebijakan, karakteristik lembaga yang masih belum memiliki SOP sesuai Kerangka Kerja Sendai, Kondisi ekonomi sosial dan politik serta disposisi pelaksana masih belum baik untuk mengimplementasikan kebijakan. Implementasi Kebijakan terhambat akibat pengetahuan yang rendah, pengurangan risiko bencana belum menjadi prioritas, sumber daya dan sarana prasarana yang kurang memadai. Disisilain solidaritas dan koordinasi BPBD dapat membantu meningkatkan implementasi kebijakan. Upaya BPBD untuk meningkatkan implementasi Kerangka Kerja Sendai yaitu melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk pencegahan dan mitigasi bencana, membentuk Desa Tangguh Bencana, melakukan pengadaan peralatan kebencanaan dan *early warning system*. Guna meningkatkan implementasi Kerangka Kerja Sendai, disarankan meningkatkan pengetahuan aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi, meningkatkan nilai-nilai Kerangka Kerja Sendai dalam rencana pembangunan, melakukan pendekatan kultural untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menjalin kerjasama secara formal atau *MoU*, rekrutmen aparatur di bidang kebencanaan, dan memasang kembali *early warning system*, dan pengadaan serta pemeliharaan peralatan kebencanaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya menganalisis tindakan prioritas Kerangka Kerja Sendai secara umum tidak sampai spesifik seperti indikator yang ditetapkan oleh UNISDR serta pembahasan yang kurang kompleks karena hanya membahas penanggulangan bencana banjir saja karena bahasannya akan terlalu luas jika menganalisis seluruh bencana yang ada di Kabupaten Situbondo.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lebih besar dan bahasan yang kompleks berkaitan implementasi Kebijakan Kerangka Kerja Sendai di Indonesia untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dari pedoman pengurangan risiko bencana internasional ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dosen pembimbing, Kepala BPBD serta jajarannya, masyarakat Situbondo yang telah membantu dan memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta untuk seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, S. (2018). Pengantar Kebijakan Publik (2nd ed.). CV. Pustaka Setia.
- BNPB. (2016). Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030. Ekp, 13(3), 1576-1580.
- BNPB. (2020). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. Jakarta, BNPB.
- BNPB. (2021). Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020. Bnpb, 78.
- Bungin, B. (2015). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (2nd ed.). Kencana.
- Control, S. Q., Product, S., & Standard, E. (1991). Bab 3 landasan teori 3.1. 11-27.
- Efendi, Ferry & Makhfud. (2009). Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika.
- Harijiko, A. dkk (2021). Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia (I. M. Bayu, Andung dan Susmayadi (ed.); 1st ed.). Gadjah Mada University Press.
- Labolo. Muhadam. (2014). Memahami Ilmu pemerintahan. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif (33rd ed.). Bandung. PT Remaja rosdakarya.
- Mulyana, D. (2003). Metodologi Penelitian Kualitatif (p. 9). Bandung: Rosda
- Ndraha, T. (2011) Kybernologi dan Metodologi: Metodologi Ilmu pemerintahan Jakarta: Rineka Cipta
- (1999). Makna Pemerintahan. Jakarta: pT yarsif Watampone.
- Nugroho, R. (2018). Public Policy (Y. Masda (ed.); 6th ed.). Jakarta. PT Gramedia.
- Nurcholis, H. (2005). Teori& Praktik Pemrintahan & Otda (Rev). Bandung. Grasindo.
- Ramli, Soehatman. (2010). Pedoman Praktis Manajemen Bencana. Jakarta: Dian Rakyat.
- Simangunsong, F. (2017). Metode Penelitian Pemerintahan (3rd ed.). Alfabeta.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soliha, Ratnia. (2019). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Tangerang Selatan. Univerits terbuka
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. In Brilliant.
- Sugiono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (13th ed.). Alfabeta.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik (Vol. 148). APII Bandung.
- Wahab, A. (2016). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (ed.); 4th ed.). PT Bumi Aksara.

Karya Ilmiah

- Jackson, G., McNamara, K., & Witt, B. (2017). A Framework for Disaster Vulnerability in a Small Island in the Southwest Pacific: A Case Study of Emae Island, Vanuatu. *International Journal of Disaster Risk Science*, 8(4), 358-373. <https://doi.org/10.1007/s13753-017-0145-6>
- Jenggawah, N., Pada, S., Berpikir, K., Dan, K., & Belajar, M. (2010). Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Jember Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember.
- Mizutori, M. (2020). Reflections on the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: Five Years

Since Its Adoption. *International Journal of Disaster Risk Science*, 11(2), 147–151. <https://doi.org/10.1007/s13753-020-00261-2>

Stefanie, K., & Puspita, N. Y. (2021). Uji Reliabilitas Sendai Framework for Disaster Risk Reduction Dalam Rehabilitasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 203–226. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art10>

van Niekerk, D., Coetzee, C., & Nemaokonde, L. (2020). Implementing the Sendai Framework in Africa: Progress Against the Targets (2015–2018). *International Journal of Disaster Risk Science*, 11(2), 179–189. <https://doi.org/10.1007/s13753-020-00266-x>

Villela, Lucia Maria Aversa. (2013). Penyebab Banjir. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Undang Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden No 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 6 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo

Sumber lainnya

RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021

RESTRA BPBD 2016-2021

Laporan Provinsi BPBD Kabupaten Situbondo Tahun 2020

Laporan Provinsi BPBD Kabupaten Situbondo Tahun 2020

RPI2-JM Situbondo 2016-2019

Situbondo Dalam Angka Tahun 2020

Situbondo Dalam Angka Tahun 2021

<https://bpbdbogorkab.go.id/bencana-dan-manajemen-bencana/>

<https://www.liputan6.com/regional/read/3221245/banjir-bandang-sehari-hanyutkan-rp-64-miliar-di-situbondo>

<https://bnpb.go.id/berita/forum-prb-media-koordinasi-dan-penguatan-kapasitas-penanggulangan-bencana>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210303142043-4-227555/kacau-indonesia-rugi-rp-228-triliun-pertahun-akibat-bencana>

https://www.maplecroft.com/search/?q=indonesia+rangking&_t_dtq=true

<https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-for-drr>

<https://www.liputan6.com/regional/read/3221245/banjir-bandang-sehari-hanyutkan-rp-64-miliar-di-situbondo>